



KIKIS NILAI DEMOKRASI YANG SUDAH TERBANGUN

# Pilkada Melalui DPRD Hilangkan 'Emotional Bonding'

**YOGYA (KR)** - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui lembaga dewan atau DPRD masih terus bergulir. Rencana tersebut justru dinilai akan mengikis demokrasi serta emotional bonding yang selama ini sudah terbangun.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogya Eko Suwanto, menjelaskan sistem demokrasi di Kota Yogya sudah berjalan cukup baik. Tidak hanya dalam proses pilkada melainkan hingga tingkat pemilihan Ketua RT. "Demokrasi kita itu mengenal pemilihan secara langsung. Jika rakyatnya bisa memilih, kenapa harus diwakilkan. Kita tidak boleh menyederhanakan proses itu," tandasnya di sela diskusi bersama Walikota Yogya Hasto Wardoyo dan awak media, Kamis (8/1).

Pilkada secara langsung, imbuhnya, selama ini mampu memberikan pengalaman demokrasi yang sangat baik.

Masyarakat sebagai pemilih menjadi lebih mengenal sosok calon pemimpin. Begitu pula sebaliknya, calon pemimpin mampu memahami kondisi faktual dan sosiologis yang dialami oleh warga. Emotional bonding atau ikatan emosional pun akan terbangun antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam aspek kebijakan dan pelayanan, ikatan emosional menjadi kunci terciptanya program yang tepat sasaran dan pro rakyat.

Eko lantas mencontohkan pengalaman ketika mengawal pasangan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan, sejak masa pendaftaran bakal calon

kepala daerah hingga ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Kota Yogya. Sejak awal jajaran struktur partai maupun para kader ikut mengawal sebagai wujud partisipasi politik. Terbukti, adanya ikatan emosional tersebut akhirnya mampu tercipta beragam program yang berdampak nyata di masyarakat. "Jika sistem pilkada itu digeser ke DPRD, maka yang terjadi justru politik di puncak menara," tandasnya.

Sementara Hasto Wardoyo pun mengakui, kampanye dengan cara door to door atau menyapa langsung masyarakat sebagai pemilih merupakan

metode yang tidak bisa tergantikan. Dengan model tersebut ikatan emosional akan mudah terbentuk sehingga kebijakan yang kelak ditelurkan pun bisa disesuaikan dengan kondisi sosiologis di masyarakat. Pola semacam itu dipastikan tidak akan ditemui jika pilkada ditentukan melalui DPRD.

Hal ini karena masyarakat sebagai pihak yang dipimpin serta menjadi bagian dari pembangunan, berhak untuk lebih mengenal pemimpinnya secara langsung, tanpa sekat. Justru, ketika warga mengenal pemimpinnya dengan baik akan terwujud pembangunan yang partisipatif. "Masyarakat bahkan ikut bergotong royong baik dalam proses penyelenggaraan pemilihan hingga jalannya pembangunan. Ini yang sebenarnya dibutuhkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam



KR-Archil Wahdan  
**Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogya dan Walikota Yogya dalam sebuah diskusi bersama awak media.**

pembangunan akan menghasilkan dampak yang lebih nyata dan dirasakan," urainya.

Dirinya yang sudah tiga kali mengikuti proses pilkada secara langsung pun memahami betul kondisi masyarakat. Hasto bahkan mengemukakan money politics yang dampaknya hanya akan men-

Oleh karena itu, ketika proses pilkada digeser dari pemilihan langsung menjadi pemilihan di lembaga dewan justru akan mengikis makna demokrasi.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika dimintai tanggapan soal wacana tersebut memilih untuk bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah pusat. Gubernur DIY menegaskan bahwa perubahan mekanisme pemilihan tersebut bukan merupakan ranah kebijakan pemerintah daerah. "Kalau soal itu kan bukan wewenang ku, itu kan wewenangnya Pemerintah Pusat, ya kita tunggu saja, apa keputusannya," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (8/1). (Dhi/Ria-f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005